

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERJADINYA KONFLIK SOSIAL DI MASYARAKAT MAJEMUK

Muhammad Sobri

Fakultas Tarbiyah IAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat
sobripraya@gmail.com

Abstract

Indonesia is a plural country with a range of conflicts. The social conflict occurs because of prejudices among people who have different ethnicities. Low levels of education also contribute to the understanding and lack of tolerance in others. Economic difficulties facing society also encourage to earn income through tight competition so that in the end of gave birth to conflict. Inter-ethnic suspicion is also augmented by religious differences. It is so easy that there are conflicts that encourage acts of violence among different members of society, so a system that can maintain peace is necessary. Education has an important role to play in preventing social conflicts in society. This is based on education that is organized with multicultural principle that believed to be a real solution for conflict and disharmonization that occur in society, especially in plural reality in Indonesia. Multiculturalism-based education can be said to succeed if it is formed in the students' attitude of tolerant, non-hostile, non-conflicting life caused by cultural differences, tribes, languages, customs and differences.

Keyword: *Multiculturalism-based education, Social conflict.*

Pendahuluan

Indonesia memiliki keanekaragaman dalam berbagai hal. Wilayahnya terdiri atas berbagai pulau besar dan kecil yang terhampar di lautan yang luas. Masyarakatnya paling pluralistik dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Indonesia terdiri aneka ragam suku, bahasa, dan bahkan warganya menganut beragam agama. Sekarang ini, jumlah pulau di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, lebih dari 200 juta jiwa penduduk dengan 300 suku dan menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda.

Keanekaragaman tersebut di satu sisi memperkuat ketahanan bangsa dan negara jika direkatkan dengan sistem nilai yang sama dan diterima. Namun demikian, keanekaragaman dapat menjadi pemicu konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Kondisi masyarakat Indonesia yang demikian itu sangat eksplosif memunculkan konflik manakala perbedaan-perbedaan tidak dapat diakomodasikan dalam kehidupan bersama dan disikapi dengan bijak.

Berbagai kasus konflik sosial yang sarat dengan SARA (suku, agama dan ras) banyak terjadi di Indonesia. Misalnya di Kalimantan Barat, Aceh, Maluku, Papua, Jawa, Lampung dan bahkan konflik antar desa seperti yang terjadi di daerah Lombok. Sebagaimana yang diberitakan secara online dalam situs mentro siantar bahwa Polisi Republik Indonesia menginventarisir ada 1.629 lokasi berpotensi konflik.

Konflik sosial di Indonesia pascaera reformasi 1998 memiliki pola yang khas. Pada medio 2012, Kemendagri merilis jumlah konflik sosial pada 2010 sebanyak 93 kasus. Kemudian menurun pada 2011

menjadi 77 kasus. Namun kemudian meningkat pada 2012 menjadi 89 kasus hingga akhir Agustus.¹ Bila ditelusuri lebih lanjut, terjadinya konflik sosial dikala itu cenderung disebabkan oleh lemahnya *sharing of understanding and acceptance* – meminjam istilah yang dikemukakan Suharto, 2005 – di tengah masyarakat yang menyangkut ruang, kekuasaan, ekonomi, dan kebudayaan.

Sumatera Utara (10), di Sulawesi Tengah (10) dan di Jawa Tengah (10) (JPNN, 2014). Berkaca dari jumlah frekuensi terjadinya konflik sosial yang begitu intens, pada 2014 lalu, Kemensos juga melancarkan program keserasian sosial di 50 wilayah rawan konflik sosial dan program penguatan kearifan lokal di 30 daerah.

Pada April 2014 lalu, Kementerian Sosial (Kemensos) merilis bahwa di Indonesia saat ini terdapat 42 titik rawan konflik sosial yang tersebar di enam pulau. Sepanjang 2013 lalu, di Papua terjadi 24 peristiwa konflik sosial, di Jawa Barat (24), di Jakarta (18), di Sumatera Utara (10), di Sulawesi Tengah (10) dan di Jawa Tengah (10).² Berkaca dari jumlah frekuensi terjadinya konflik sosial yang begitu intens, pada 2014 lalu, Kemensos juga melancarkan program keserasian sosial di 50 wilayah rawan konflik sosial dan program penguatan kearifan lokal di 30 daerah.

Konflik sosial tersebut terjadi karena adanya prasangka di antara masyarakat yang memiliki berbagai etnik yang berbeda. Tingkat pendidikan yang rendah juga memberikan andil dalam pemahaman dan minimnya toleransi pada orang lain yang berbeda. Kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat juga turut mendorong untuk mencari penghasilan melalui persaingan yang ketat sehingga

¹ Data tersebut dilansir pada berita online Antaranews

² Data titik rawan konflik di Indonesia tersebut dapat akses pada portal berita JPNN yang dilansir pada tahun 2014.

pada akhirnya melahirkan konflik. Kecurigaan antar etnis juga ditambah dengan perbedaan agama yang dianut. Begitu mudahnya terjadi konflik yang mendorong tindak kekerasan diantara anggota masyarakat yang berbeda, maka diperlukan suatu sistem yang dapat menjaga perdamaian.

Pendidikan sudah selayaknya berperan dalam menyelesaikan dan mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Minimal pendidikan harus mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa konflik bukan suatu hal yang baik untuk dibudayakan dan termasuk memberikan tawaran-tawaran yang mencerdaskan, antara lain dengan cara mendesain materi, metode hingga kurikulum pendidikan multikultural yang mengembangkan serta menanamkan pada siswa dengan sikap saling toleran, menghormati perbedaan suku, agama, ras etnis dan budaya masyarakat Indonesia yang majemuk.

Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural adalah suatu ide, gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah.³

Pendapat yang lebih lengkap tentang pendidikan multikultural dikemukakan oleh Ainul Yaqin bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada

³ Banks, J., & Banks, C.M, *Multicultural Education: Issues And Perspective*, (New York: willey, 2010), h. 3

semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada siswa, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif.⁴ Pendidikan multikultural juga untuk melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis.

Inti dari konsep pendidikan multikultural yaitu kesetaraan dan kesempatan yang sama pada semua warga negara dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Namun, merumuskan konseptualisasi pendidikan multikultural perlu dilaksanakan tergantung dari kondisi, latar belakang dan tantangan yang dihadapi suatu negara. Dalam konteks Indonesia pendidikan multikultural diwujudkan rangka menumbuhkan kesadaran akan kemajemukan dan menanamkan pada siswa dengan sikap toleransi untuk mewujudkan individu yang menghargai keanekaragaman budaya yang ada di masyarakat.

Urgensi Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural lahir dan berkembang di Amerika Serikat yang tidak terlepas dari adanya tindakan diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan adanya penindasan kultur mayoritas atas kultur minoritas, sehingga terjadi gerakan yang menuntut persamaan hak dan mendapatkan kesetaraan dalam pendidikan bagi wanita, kelompok etnis, kaum minoritas, kelompok ekonomi rendah dan kelompok berkemampuan khusus.

4 Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi Dan Keadilan, (Yogyakarta: Pilar Media. 2005), h. 25

Konteks di Indonesia, gagasan pendidikan multikultural muncul ketika K.H Abdurrahman Wahid yang pada waktu itu menjadi Presiden Republik Indonesia yang secara nyata memberikan ruang yang luas untuk mengakui semua hak-hak dasar dan sosial budaya rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk mengakui keberadaan budaya dan keyakinan masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia.

Pendidikan multikultural kemudian diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran tidak saja mengakui perbedaan, tetapi mampu hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keragaman keyakinan tradisi, adat maupun budaya, dan yang paling utama adalah mengembangkan sikap tolong-menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan.⁵

Ada dua hal untuk mewujudkan pendidikan multikultural yang bisa memberikan ruang kebebasan bagi semua kebudayaan untuk berekspresi. Pertama, dialog. Dalam pendidikan multikultural, setiap peradaban dan kebudayaan yang ada pada posisi yang sama dan sejajar. Dialog meniscayakan adanya persamaan dan kesejajaran di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya dialog, diharapkan terjadi sumbangan pemikiran yang pada gilirannya kan memperkaya kebudayaan yang bersangkutan. Dialog juga sangat penting untuk mencari titik temu antara kebudayaan yang ada. Setiap kebudayaan memiliki ukuran-ukuran dan nilai-nilainya sendiri tentang suatu hal, meskipun tidak tertutup kemungkinan

5 Mudzhar, M. Atho. Kebijakan Negara dan Pembangunan Lembaga Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antarUmat Beragama. (Jakarta: Puslitbang Depag. 2004), h. 18-19

ditemukannya common platform atau kesamaan di antara kelompok atau golongan-golongan yang berbeda.

Kedua adalah toleransi. Toleransi merupakan sikap menerima orang dengan segala perbedaannya. Toleransi dibutuhkan tidak hanya dalam tataran konseptual, melainkan pada teknis operasional. Hal inilah yang sudah lama absen dalam sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan selama ini terlalu menitikberatkan pada memperkaya pengetahuan dan keterampilan tetapi mengabaikan penghargaan atas nilai-nilai budaya dan tradisi bangsa. Maka wacana tentang pendidikan yang menghargai dan menjunjung tinggi terwujudnya kesetaraan budaya merupakan suatu keharusan yang harus diimplementasikan dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip multikultural diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya kerap terjadi di Indonesia yang realitas plural. Pendidikan berbasis multikulturalisme dapat dikatakan berhasil apabila terbentuk pada diri siswa sikap hidup saling toleran, tidak bermusuhan dan tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, bahasa, adat istiadat dan segala perbedaan yang ada.

Pendidikan multikultural merupakan suatu refleksi atas kesadaran diri atas realitas kemajemukan masyarakat Indonesia. Pendidikan semacam ini lebih mengarah pada pengembangan kesadaran dan kebersamaan dalam konteks perbedaan kultur masyarakat.⁶

⁶ Zamroni, Pendidikan Dan Demokrasi Dalam Transisi. (Yogyakarta: PSAP Muhammadiyah. 2007), h. 269

Selain sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, pendidikan berbasis multikultural juga signifikan dalam membina siswa agar tidak tercerabut dari akar budaya yang dimilikinya tatkala berhadapan dengan realitas sosial budaya di era globalisasi. Untuk mensikapi realitas global, siswa hendaknya diberikan penyadaran akan pengetahuan yang beragam, sehingga siswa memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan global, termasuk aspek kebudayaan. Pendidikan multikultural dapat dijadikan sebagai basis dalam pengembangan kurikulum pendidikan guna untuk membangun generasi muda memiliki ketahanan dan identitas nasional, dan pada gilirannya ancaman disintegrasi bangsa dapat dicegah serta mampu bersaing di era globalisasi.

Melihat begitu penting pendidikan multikultural maka perlu dirumuskan bagaimana implementasinya dalam kurikulum pendidikan. James Banks mengidentifikasi beberapa tahap implementasi pendidikan multikultural yang saling berhubungan dan berkaitan yaitu: content integration, the knowledge construction process, an equity pedagogy, and prejudice reduction, an empowering school culture and social structure.⁷

Langkah pertama, content integration, dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok ke dalam kelas seperti tari-tarian, baju adat perayaan hari besar dan sebagainya untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. Langkah kedua, membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran termasuk mendorong siswa supaya aktif

⁷ James Banks, *Educating citizens in a multicultural society*, (New York: Teacher College Press. 2007), h. 115

dalam kegiatan pembelajaran dalam membangun pengetahuan (the knowledge construction proces).

Langkah ketiga, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam, baik dari segi ras, budaya ataupun sosial dengan prinsip equity. Langkah keempat, prejudice reduction. Sebagai upaya agar para siswa menghargai dan memahami adanya perbedaan kultur yang menyertainya. Pada tahap ini guru harus mampu mengidentifikasi karakteristik ras siswa, dan menentukan metode pengajaran. Kemudian melatih kelompok siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, berinteraksi dengan seluruh staff dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif. Langkah terakhir, melakukan rekonstruksi baik struktur maupun kultur sekolah. Hal ini diperlukan untuk memberikan jaminan pada semua siswa dengan latar belakang budaya, sosial dan ekonomi yang berbeda supaya mendapatkan pengalaman dan perlakuan yang setara.

Konflik Sosial Dalam Masyarakat Majemuk

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Realitas yang tidak bisa dipungkiri pada suatu masyarakat terutama di Indonesia adalah adanya keanekaragaman dan perbedaan dari aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya. Berbagai

perbedaan yang ada dalam masyarakat kalau dikelola dengan bijak akan menjadi suatu modal dan kekuatan untuk membangun masyarakat yang lebih baik, makmur dan sejahtera. Keanekaragaman dalam masyarakat mempunyai dinamika yang menghasilkan gerakan-gerakan dalam segala aspek kehidupan yang berwujud positif dan negatif. Sifat negatif dari dinamika kehidupan masyarakat terjadi karena adanya gesekan-gesekan atas perbedaan yang seringkali mengarah pada konflik. Konflik bisa berwujud argumentasi, intimidasi, sampai konflik fisik perorangan, kelompok, suku dan etnik.

Kemajemukan suatu masyarakat bukan saja bersifat horisontal (perbedaan etnik, agama dan sebagainya), tetapi juga cenderung vertikal, yaitu terpolarisasinya status dan kelas sosial berdasar kekayaan dan jabatan atau pekerjaan yang diraihinya. Dalam hal yang pertama, perkembangan ekonomi pasar membuat beberapa kelompok masyarakat tertentu, khususnya dari suatu etnik yang memiliki tradisi dagang, naik peringkatnya menjadi kelompok masyarakat yang menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat setempat yang mandeg perkembangannya. Dalam hal kedua, kelompok masyarakat etnis dan agama tertentu, yang semula berada di luar mainstream, yaitu berada di pinggiran, mulai menembus masuk ke tengah mainstream. Hal ini dapat menimbulkan gesekan primordialistik, apalagi bila ada motif politik dan ekonomi tertentu seperti terjadi di Ambon, Poso, Aceh dan lainnya

Konflik yang terjadi di Indonesia dinilai ada kaitannya dengan akar struktural. Namun, tetap konflik tersebut tetap bersifat kultural. Menurut Arie Sujito, sampai saat ini kedua faktor tersebut masih sangat berkaitan. Faktor struktural menyangkut ketidakadilan

sehingga menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan. Sedangkan faktor kultural lebih mendominasi pada mentalitas komunal dan komodifikasi identitas.⁸ Contohnya, konflik dikarenakan SARA juga berkaitan dengan persoalan sentimen pada identitas dan tafsir kebenaran. Namun, di balik hal tersebut SARA juga beririsan dengan permasalahan kesenjangan sosial yang meledak.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa sejumlah konflik sosial dalam masyarakat Indonesia telah berubah menjadi destruktif bahkan cenderung anarkhis. Banyak hal yang patut direnungkan dan dicermati dengan fenomena konflik sosial di masyarakat. Apakah fenomena konflik sosial merupakan peristiwa yang bersifat insidental dengan motif tertentu dan kepentingan sesaat, ataukah justru merupakan budaya dalam masyarakat yang bersifat laten. Syafri Sairin memetakan akar-akar konflik dalam masyarakat majemuk, yaitu: (1) perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi; (2) perluasan batas-batas budaya; (3) benturan kepentingan politik, ideologi, dan agama.⁹

Konflik agraria bisa dikatakan sebagai contoh tentang persoalan perebutan sumber daya. Penduduk setempat dalam suatu daerah membutuhkan sumber-sumber agraria sebagai sumber kehidupan dan untuk kelanjutan hidup, sehingga hanya membutuhkan alokasi sumber-sumber agraria yang relatif sedikit. Sementara para pengusaha yang mempunyai target untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, cenderung

8 Arie Sujito. Konflik di Indonesia dipengaruhi 2 faktor. Diambil pada jam 19.00 PM WITA pada tanggal 16 April 2016 pada laman <http://nasional.sindonews.com>.

9 Syafri Sairin, Telaah Pengelolaan Keresasian Sosial Dari Literatur Luar Negeri Dan Hasil Penelitian Indonesia, (Jakarta: Kerjasama KLH dan UGM, 1992), h. 66

membutuhkan alokasi sumber agraria dalam skala besar. Perbedaan skala kepentingan dan kebutuhan tersebut mengakibatkan konflik di antara kedua kelompok kepentingan tersebut.

Adanya kebijakan desentralisasi yang mendorong ditingkatkannya batas-batas identitas kebudayaan di Indonesia, baik identitas etnik, agama maupun golongan. ketika batas-batas kebudayaan semakin nyata dan tajam, dan orientasi primordialisme. Hal tersebut dapat memicu konflik antar etnik, agama, dan golongan.

Munculnya konflik dalam konteks Indonesia dapat disebabkan karena kontestasi politik yang ada atau munculnya konflik politik. Biasanya konflik politik itu terjadi di kalangan para elit, yang saling berupaya mencari pengaruh di dalam konteks perebutan kekuasaan yaitu melalui ajang Pemilihan Umum. Artinya elit politik ingin memperteguh hegemoninya dengan cara menciptakan kekerasan komunal untuk menjatuhkan kelompok pesaingnya. Dengan demikian, konflik sosial ini dapat terjadi karena adanya persaingan politik di dalam dinamika perpolitikan daerah di dalam upayanya untuk saling berebut pengaruh.

Pendidikan Multikultural Sebagai Preventif Konflik Sosial

Berdasarkan kondisi geografis, Negara Indonesia memiliki banyak pulau di mana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak beraneka ragam, agama suku dan etnis.

Pertemuan berbagai macam etnis pada sentra-sentra kebudayaan seperti di kota-kota besar merupakan persoalan yang menarik. Hasil dari pertemuan budaya dapat menimbulkan sebuah kreativitas baru yang pada akhir memperkaya kebudayaan. Namun, pada sisi lain keanekaragaman budaya menjadi persoalan besar terjadinya konflik sosial yang berujung pada disintegrasi negara ketika adanya stereotip, sentimen, dan hegemoni suatu budaya yang menutup ruang untuk mengakui kesejajaran antar kebudayaan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang dapat mencegah terjadinya konflik sosial dengan cara menanamkan sikap menghargai dan mengapresiasi budaya lain dalam masyarakat yang majemuk melalui pendidikan multikultural.

Secara global, pendidikan multikultural telah direkomendasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNESCO pada tahun 1994 yang dinyatakan sebagai berikut.(1)Pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi, dan bekerjasama dengan yang lain. (2) Pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian yang memperkuat perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat.(3)Pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan.¹⁰

10 Poli, W.I.M. Hubungan Antar Manusia dan Penanganan Konflik. (Makassar: Ahkam. 2004), h. 146-147

Pendidikan multikultural diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang memiliki sikap kemandirian dalam menyadari dan menyelesaikan segala problem kehidupannya dengan berbagai macam strategi pendidikan agar bisa mengimplementasikannya melalui visi dan misi yang selalu menegakkan dan menghargai pluralisme, demokrasi dan humanism serta mencetak para generasi penerus menjadi generasi sadar pada keberagaman.

Pendidikan multikultural dapat berfungsi sebagai sarana alternative preventif terjadinya konflik sosial. Melalui pendidikan yang berbasis multikultur, siswa diharapkan tidak tercerabut dari akar budayanya. Pendidikan multikultural sangat relevan di praktekkan pada alam demokrasi seperti yang diterapkan di Indonesia. Spektrum kultur masyarakat Indonesia yang amat beragam memang merupakan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk mengolah bagaimana keragaman tersebut justru dapat dijadikan sebagai asset, bukan sebagai sumber perpecahan.

Selain itu, pendidikan dengan berbasis multikultural bertujuan: (1) untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam; (2) membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan; (3) memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya; (4) membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok.

Praktik pendidikan multikultural di Indonesia dapat dilaksanakan secara fleksibel. Prinsip fleksibilitas pendidikan multikultural harus terintegrasi dan terpadu, diperlakukan sebagai

pendekatan untuk memajukan pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Pendidikan multikultural juga dapat diberlakukan sebagai alat bantu untuk menjadikan warga masyarakat lebih memiliki toleran, bersifat inklusif, dan memiliki jiwa kesetaraan dalam hidup bermasyarakat, serta senantiasa berpendirian suatu masyarakat secara keseluruhan akan lebih baik, manakala siapa saja warga masyarakat memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki bagi masyarakat sebagai keutuhan.¹¹ Bahkan pendidikan harus memberi kesempatan bagi siswa untuk mempelajari bagaimana suatu kultur masyarakat bisa berperan dalam upaya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warganya.

Apapun dan bagaimanapun bentuk dan model pendidikan multikultural, mestinya tidak dapat lepas dari tujuan umum pendidikan multikultural, yaitu:(a) membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan;(b)membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok;(c) dan mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang proses menciptakan sistem dan menyediakan pelayan pendidikan yang setara.

Sebagai suatu gerakan pembaharuan dan proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh siswa, pendidikan multikultural memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: prinsip pertama: pendidikan multikultural adalah gerakan

¹¹ Pendapat Gay (2002) yang dikutip oleh Zamroni, dalam bukunya berjudul "Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural", (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama), h. 150

politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada. Prinsip kedua: pendidikan multikultural mengandung dua dimensi: pembelajaran (kelas) dan kelembagaan (sekolah) dan antara keduanya tidak bisa dipisahkan, tetapi justru harus ditangani lewat reformasi yang komprehensif. Prinsip ketiga: pendidikan multikultural menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya lewat analisis kritis atas sistem kekuasaan dan privileges ntuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan. Prinsip keempat: berdasarkan analisis kritis ini, maka tujuan pendidikan multikultural adalah menyediakan bagi setiap siswa jaminan memperoleh kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Prinsip kelima: pendidikan multikultural adalah pendidikan yang baik untuk seluruh siswa, tanpa memandang latar belakangnya.

Tilaar menambahkan bahwa terdapat tiga prinsip pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh antara lain sebagai berikut: Pendidikan multikultural didasar pada pedagogik kesetaraan manusia (equity pedagogy).¹² Pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini arah serta nilai-nilai baik dan buruk yang dibawanya. Ketiga prinsip tersebut sudah dapat menggambarkan bahwa arah dari wawasan multikultural adalah menciptakan

12 Tilaar, H.A.R.. *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan Dalam Trasformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 23

manusia yang terbuka terhadap segala macam perkembangan zaman dan keragaman berbagai aspek dalam kehidupan modern.

Pendidikan multikultural juga sangat relevan dengan pendidikan demokrasi di masyarakat plural seperti Indonesia, yang menekankan pada pemahaman akan multi etnis, multi ras, dan multikultur yang memerlukan konstruksi baru atas keadilan, kesetaraan dan masyarakat yang demokratis.

Kesimpulan

Keanekaragaman dalam masyarakat mempunyai dinamika yang menghasilkan gerakan-gerakan dalam segala aspek kehidupan yang berwujud positif dan negatif. Sifat negatif dari dinamika kehidupan masyarakat terjadi karena adanya gesekan-gesekan atas perbedaan yang seringkali mengarah pada konflik. Konflik bisa berwujud argumentasi, intimidasi, sampai konflik fisik perorangan, kelompok, suku dan etnik.

Untuk mengantisipasi terjadinya konflik di masyarakat majemuk maka diperlukan sebuah ideologi yang bisa mengakomodasi segala permasalahan yang disebabkan karena keanekaragaman budaya, Ideologi tersebut adalah multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan suatu pengakuan atas kesejajaran terhadap keberadaan dan keunikan budaya kelompok yang beranekaragam.

Pengakuan kesejajaran, apresiasi dan toleransi terhadap budaya lain dapat diwujudkan melalui pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural yaitu pendidikan yang memberikan kesetaraan dan kesempatan yang sama pada semua warga negara dalam mendapatkan pelayanan pendidikan.

Pendidikan multikultural dalam konteks bangsa Indonesia yang majemuk sangat urgen karena berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik; diharapkan siswa tidak tercerabut dari akar budayanya dan sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum pendidikan termasuk dalam pembelajaran IPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul Yaqin. 2005. *Pendidikan multikultural: cross-cultural understanding untuk demokrasi dan keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Banks, J., & Banks, C.M. 2010. *Multicultural Education: issues and perspective*. New York: Willey.
- Banks, James 2007. *Educating citizens in a multicultural society*. New York: Teacher College Press.
- Parsudi Suparlan. 2004. Masyarakat majemuk, masyarakat multikultural, dan minoritas: memperjuangkan hak-hak minoritas. Diakses pada tanggal 25 Mei 2013, dari [Http://Interseksi.Org/Publications/Essays/Articles/Masyarakat_Majemuk.Html](http://Interseksi.Org/Publications/Essays/Articles/Masyarakat_Majemuk.Html)
- Suyanto & Abbas. 2001. *Wajah dan dinamika pendidikan anak bangsa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Syafri Sairin. 1992. *Telaah pengelolaan keserasian sosial dari literatur luar negeri dan hasil penelitian Indonesia*. Jakarta: Kerjasama KLH dan UGM.
- Zamroni. 2007. *Pendidikan dan demokrasi dalam transisi*. Yogyakarta: PSAP Muhammadiyah.
- . 2011. *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.